

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatkan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945. Ketika kebutuhan material, spiritual, dan sosial penduduk suatu negara terpenuhi, mereka dapat hidup dengan baik, berkembang, dan menjalankan peran sosial dan ekonominya. Hal ini dikenal sebagai kesejahteraan umum (BPS, 2016). Tingkat kemiskinan di Indonesia berkontribusi terhadap kesejahteraan negara secara keseluruhan. Khususnya di Indonesia, kemiskinan merupakan masalah serius yang masih sulit untuk diatasi. Di Indonesia, di mana sebagian besar penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan, kemiskinan menjadi sebuah masalah. Dalam hal negara berkembang, Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi (Andhykha, Handayani & Woyanti, 2018).

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional, sehingga upaya pengentasan kemiskinan perlu mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu (Prastyo, 2010). Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 13/2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagai kerangka hukum untuk membantu mengurangi kemiskinan. Peraturan ini mengatur strategi berbasis rencana pembangunan jangka panjang nasional untuk mengurangi kemiskinan. Kebijakan anti-kemiskinan lainnya adalah kebijakan Presiden No. 10 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pada tahap ini, strategi penanggulangan kemiskinan mengarah ke arah yang sama dengan per

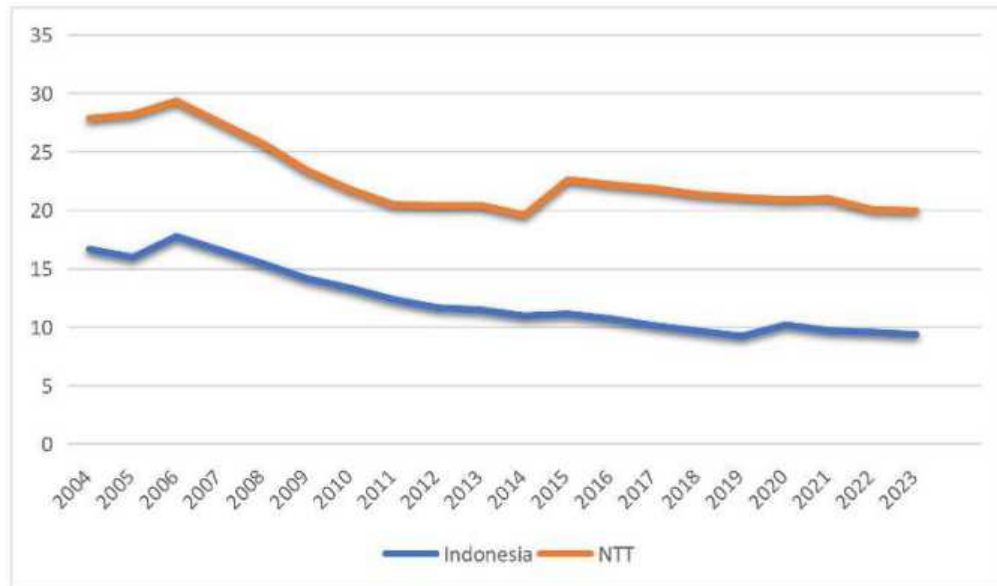


Bagi Indonesia, kemiskinan sudah sejak lama menjadi persoalan bangsa, di mana hingga sekarang masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan tahun 2023 tercatat sebanyak 25,90 juta orang atau kurang lebih 9,36 persen. Penyebab adanya penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor, pertumbuhan ekonomi yang stabil setelah pemulihan dari pandemi COVID-19 telah meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas dan peluang kerja. Kebijakan ekonomi yang inklusif, yang mendorong inklusi keuangan dan pengembangan usaha kecil serta akses terhadap kredit mikro, turut membantu masyarakat miskin.

Salah satu provinsi yang masih bergelut dengan kemiskinan dan kesulitan untuk mengentaskannya adalah Nusa Tenggara Timur. Bagi masyarakat yang tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kerawanan pangan dan kekeringan masih menjadi masalah rutin. Masih tingginya persentase angka kemiskinan di setiap Kabupaten/Kota di provinsi Nusa Tenggara Timur, membuat provinsi ini terus dilanda permasalahan kemiskinan. Dalam urutan tingkat kemiskinan di seluruh provinsi di Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur menduduki peringkat ke tiga provinsi termiskin setelah Papua dan Papua Barat dengan memiliki jumlah penduduk 5,3 juta jiwa dan luas wilayah 47,9 ribu km² tetapi memiliki persentase tingkat kemiskinan yang tinggi sebesar 1,146 juta jiwa atau 20,14 persen.



Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia Tahun 2004-2023



Sumber: BPS 2023

Dilihat dari Grafik 1.1 di atas menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dari tahun 2004-2023. Secara umum, persentase penduduk miskin di Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 16,66% pada tahun 2004 menjadi 9,36% pada tahun 2023. Sebaliknya, persentase penduduk miskin di NTT, meskipun juga mengalami penurunan, tetap lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Pada tahun 2004, persentase penduduk miskin di NTT 27,86% dan menurun menjadi 19,96% pada tahun 2023, dengan fluktuasi yang cukup signifikan pada tahun 2015. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam pengentasan kemiskinan, NTT masih menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan rata-rata nasional, memerlukan perhatian khusus dalam upaya pengurangan kemiskinan.



Adapun faktor yang paling sering dijadikan tolok ukur dalam melihat kemiskinan adalah pendapatan perkapita masyarakat. Kemiskinan memiliki kaitan hubungan dengan pendapatan masyarakat. Masyarakat yang

mempunyai pendapatan tinggi biasanya mendapatkan peluang lebih besar tercukupinya kebutuhan rumah tangga dibandingkan masyarakat dengan pendapatan rendah. Pendapatan rata-rata penduduk atau yang dikenal dengan pendapatan per kapita dijadikan ukuran kesejahteraan ekonomi oleh setiap negara. Selain itu, juga dapat menggambarkan jurang tingkat kemakmuran antara negara satu dengan negara lain dalam pembangunan ekonomi. Penduduk yang memiliki pendapatan per kapita tinggi mengidentifikasi kesejahteraan penduduk tersebut tinggi. Sukirno (2010) mengatakan bahwa tingginya pendapatan per kapita menyebabkan daya beli masyarakat ikut bertambah, dari bertambahnya daya beli akan meningkat pula kesejahteraan masyarakat.

Adapun faktor yang paling sering dijadikan tolak ukur dalam melihat kemiskinan yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pemerintah dalam kebijakannya terus berupaya membangun agar Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan unggul dan berkualitas. Hal itu bisa dicapai dengan akses pendidikan yang mudah didapatkan oleh seluruh rakyat. Pendidikan merupakan hal penting dalam pembangunan. Semakin tinggi tingkat pendidikan di suatu wilayah, maka semakin berkualitas Sumber Daya Manusia yang ada di wilayah tersebut. Pendidikan bukan hanya mencerdaskan, tetapi juga meningkatkan akses terhadap kehidupan yang lebih baik

Salah satu indikator dalam melihat baik atau tidaknya tingkat pendidikan di suatu wilayah/negara dapat dilihat melalui angka rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan penduduk di suatu wilayah. Rata-rata lama sekolah merupakan lamanya pendidikan yang telah ditempuh oleh seseorang.



Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu wilayah/negara yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK juga mempengaruhi kemiskinan karena jumlah penduduk yang besar akan membuat permasalahan baru yaitu ketenagakerjaan. Banyaknya jumlah penduduk yang berusia produktif di Indonesia tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang ada, sehingga penduduk berusia produktif tersebut menambah jumlah pengangguran dan kemudian berdampak pada meningkatnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia.

TPAK adalah rasio antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja. Angkatan kerja bertambah dan TPAK meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk usia kerja (Sukirno, 2007). Sukirno (2007) mendefinisikan angkatan kerja sebagai jumlah total pekerja dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Penduduk yang bekerja, penduduk yang menganggur, dan para pencari kerja membentuk angkatan kerja. Semakin besar TPAK, semakin besar pula angkatan kerja dalam kelompok yang sama. Sebaliknya semakin besar jumlah penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga, semakin besar jumlah yang tergolong bukan angkatan kerja, maka semakin kecil jumlah angkatan kerja, dan akibatnya semakin kecil pula TPAKnya (Mantra, 2003).

Adapun faktor lainnya yaitu pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari penurunan kemiskinan di suatu wilayah. Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar, karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat

akibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan. Adapun dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya sehingga dapat



melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut, angka pendapatan per kapita akan meningkat sehingga secara otomatis terjadi pula peningkatan kemakmuran masyarakat dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin. Akibatnya, sasaran utama dalam pembangunan ekonomi lebih ditekankan pada usaha-usaha pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di masing-masing provinsi mengindikasikan bahwa pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan ini pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Apakah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
3. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur?



1.3 Tujuan Penelitian

Dari masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan pada penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh Rata-rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Pada penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai masalah kemiskinan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan atau pengetahuan mengenai pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia.

- b. Bagi pemerintah

Pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dalam menangani masalah kemiskinan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan adalah salah satu faktor yang menghalangi pengembangan sumber daya manusia karena membuat sulit bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Definisi kemiskinan masih diperdebatkan, karena kemiskinan telah menjadi isu yang memiliki banyak sisi, terdapat banyak variasi dalam definisi kemiskinan. Hal ini berarti bahwa kemiskinan terkait dengan berbagai aspek kesejahteraan manusia. Ketidakmampuan untuk membayar kebutuhan, baik sandang maupun non sandang, merupakan salah satu ukuran kemiskinan. Oleh karena itu, penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (BPS, 2017).

"Ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum" adalah salah satu definisi kemiskinan. Pangan, pakaian, papan, pendidikan, dan kesehatan adalah kebutuhan dasar manusia. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar, yang mencakup kebutuhan makan dan non-makan, menurut Badan Pusat Statistik (Andiny dan Mandasari, 2017). Selain itu, Beik (2016) menyatakan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak memiliki sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka. Definisi ini didasarkan pada

ekonomi, sosial, psikologis, dan spiritual.

Dari pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kemiskinan nisikan sebagai standar hidup yang rendah, yaitu adanya tingkat



kekurangan materi dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum di masyarakat yang bersangkutan. Secara ekonomis, kemiskinan juga dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

2.1.2 Teori Kemiskinan

Dalam memahami kemiskinan, terdapat berbagai teori dan pendekatan. Namun, untuk keperluan penelitian ini, secara sederhana dapat dikategorikan menjadi dua teori besar (grand theory), yaitu teori lingkaran kemiskinan dan teori modal manusia (human capital theory). Kedua teori ini menawarkan perspektif berbeda: teori pertama melihat kemiskinan dari sudut pandang struktural, sedangkan teori kedua menyorohtnya dari sisi individu. Kedua pandangan ini kemudian menjadi dasar dalam menganalisis kemiskinan serta merumuskan kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut.

2.1.2.1 Teori Lingkaran Kemiskinan

Lingkaran kemiskinan adalah suatu lingkaran atau suatu rangkaian yang saling mempengaruhi satu sama lain secara sedemikian rupa, sehingga menimbulkan suatu keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, baik investasi manusia dan investasi kapital. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan seterusnya. Logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse 1953, yang mengatakan *“a poor country is a poor because it is poor”* (negara miskin itu



miskin karena dia miskin). Teori ini menjelaskan sebab-sebab kemiskinan dinegara-negara sedang berkembang yang umumnya baru merdeka dari penjajahan asing (Didu & Fauzi, 2016).

Lingkaran pertama, karena miskin, seseorang tidak memiliki biaya untuk mendapatkan daya beli informasi dan pengetahuan. Daya beli informasi dan pengetahuan ini diidentikkan sebagai pendidikan. Rendahnya pendidikan menyebabkan masyarakat yang miskin memiliki pengetahuan yang kurang. Pengetahuan yang kurang dan pendidikan yang rendah membuat daya saing seseorang di dunia kerja maupun dunia usaha menjadi rendah akhirnya akan menyebabkan produktivitas seseorang menjadi kecil. Karena produktivitasnya yang kecil inilah membuat masyarakat akan jatuh miskin lagi

Lingkaran kedua, karena miskin, seseorang hanya memiliki pendapatan kecil. Pendapatannya yang kecil membuat daya tabungnya juga kecil, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup masih belum layak. Tabungan yang kecil, akan membuat kepemilikan modal seseorang menjadi kecil pula. Kepemilikan modal yang kecil membuat seseorang tidak punya modal untuk membuka usaha sehingga mengakibatkan produksinya rendah bahkan tidak punya usaha sama sekali akhirnya pendapatannya kecil. Pendapatan yang kecil juga bisa dikarenakan tidak punya pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Karena pendapatannya kecil, ia akan jatuh miskin lagi (Handayani, 2018).

2.1.2.2 Teori Pertumbuhan Baru (*New Growth Theory*)



Dalam teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan rintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk

meningkatkan produktivitas manusia. Dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang (Didu & Fauzi, 2016). Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan memperluas kesempatan bekerja. Rendahnya akses ke kesempatan bekerja masyarakat miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan. Sehingga, semakin rendahnya pendidikan masyarakat maka, akan semakin meningkatkan tingkat kemiskinan di sebuah wilayah.

2.1.3 Ukuran Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan ada tiga indikator yang sering digunakan di dalam banyak studi empiris. Pertama, the incidence of poverty: persentase dari populasi yang hidup di dalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi per kapita di bawah garis kemiskinan. Kedua, the depth of poverty yang menggambarkan dalamnya kemiskinan di suatu wilayah yang diukur dengan indeks jarak kemiskinan (IJK), atau dikenal dengan sebutan poverty gap index. Ketiga, the severity of poverty yang diukur dengan indeks keparahan kemiskinan (IKK). Secara umum ada dua macam ukuran kemiskinan yang biasa digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relative.

1. Kemiskinan Absolut

Pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Seseorang dapat diklasifikasikan sebagai miskin jika pendapatannya kurang dari kebutuhan



dasarnya. Oleh karena itu, ukuran kemiskinan adalah selisih antara pendapatan seseorang dengan jumlah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Garis yang memisahkan antara mereka yang miskin dan tidak miskin, yang sering disebut sebagai garis kemiskinan, adalah tingkat pendapatan minimum (Todaro, 1997 dalam Lincoln Arsyad, 2004).

Definisi kemiskinan absolut adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar, termasuk perumahan, makanan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan, untuk bertahan hidup dan bekerja. Nilai finansial dari seperangkat kebutuhan minimum dinyatakan dalam bentuk uang. Garis kemiskinan didefinisikan sebagai biaya kebutuhan hidup. Orang dianggap miskin jika pendapatan mereka kurang dari ambang batas kemiskinan federal.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan yang terjadi sebagai akibat dari inisiatif pembangunan yang tidak mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan menimbulkan kesenjangan distribusi pendapatan dikenal sebagai kemiskinan relatif. Bagian "termiskin" dari populasi, seperti 20 atau 40 persen terendah dari keseluruhan populasi yang diurutkan berdasarkan pendapatan/pengeluaran, menjadi pusat perhatian dan norma-norma standar didefinisikan tergantung pada kondisi kehidupan suatu negara pada saat tertentu. Jumlah penduduk dalam kelompok ini relatif miskin, sehingga ukuran kemiskinan relatif sangat bergantung pada distribusi pendapatan dan pengeluaran mereka.

Ukuran kemiskinan juga bisa dihitung melalui pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan untuk mengukur kemiskinan ini



mengasumsikan bahwa seseorang dan rumah tangga dikatakan miskin jika pendapatan atau konsumsi minimumnya berada di bawah garis kemiskinan. Ukuran-ukuran kemiskinan ini dihitung menurut Coudouel dalam artikel (Putrakunto, 2009) adalah:

1) *Head Count Index*

Head Count Index menentukan proporsi populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan.

2) *Sen Poverty Index*

Koefisien Gini dan rasio H adalah dua komponen yang membentuk *Sen Poverty Index*. Ketimpangan penduduk miskin diukur dengan koefisien Gini. Menurut S, tingkat kemiskinan meningkat jika salah satu dari variabel ini meningkat.

3) *Poverty Gap Index*

Poverty Gap Index mengukur besarnya distribusi pendapatan orang miskin terhadap garis kemiskinan. Pembilang pada pendekatan ini menunjukkan jurang kemiskinan (poverty gap), yaitu penjumlahan (sebanyak individu) dari kekurangan pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan penyebut adalah jumlah individu di dalam perekonomian (n) dikalikan dengan nilai garis kemiskinan. Dengan ukuran ini, tingkat keparahan kemiskinan mulai terakomodasi. Ukuran kemiskinan akan turun lebih cepat bila orang-orang yang dientaskan adalah rumah tangga yang paling miskin, dibandingkan bila pengentasan kemiskinan terjadi pada rumah tangga miskin yang paling tidak miskin.

4) *Foster-Greer-Torbecke Index*



Seperti Indeks-indeks di atas, indeks FGT ini sensitif terhadap distribusi jika $\alpha > 1$. Bagian $(Z - Y_i/Z)$ adalah perbedaan antara garis kemiskinan (Z) dan tingkat pendapatan dari kelompok ke- i keluarga miskin (Y_i) dalam bentuk suatu presentase dari garis kemiskinan.

2.1.4 Penyebab Kemiskinan

Ditinjau dari sumber penyebabnya, kemiskinan dapat dibagi menjadi kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural adalah kondisi pikiran yang diakibatkan oleh cara hidup, adat istiadat, dan budaya seseorang atau suatu komunitas. Pola pikir individu atau kelompok masyarakat yang meyakini bahwa mereka tidak miskin, meskipun sebenarnya masih berada di bawah ambang batas kemiskinan, adalah hal yang mendefinisikan kemiskinan kultural. Di sisi lain, kemiskinan struktural berasal dari struktur masyarakat yang timpang, yang dapat disebabkan oleh distribusi pembangunan dan hasil-hasilnya yang tidak merata atau ketimpangan yang tidak adil dalam hal kepemilikan, kemampuan, pendapatan, dan kesempatan kerja. Ciri umum dari kemiskinan struktural adalah organisasi masyarakat yang timpang, terutama dalam hal ukuran-ukuran ekonomi.

Kemiskinan memang merupakan masalah multidimensi yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Kondisi kemiskinan setidaknya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: Pertama, rendahnya taraf pendidikan dan kesehatan berdampak pada keterbatasan dalam pengembangan diri dan mobilitas. Hal ini berpengaruh terhadap daya kompetisi dalam merebut atau

masuk dunia kerja. Kedua, rendahnya derajat kesehatan dan gizi berdampak rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan selanjutnya akan mengurangi jika. Ketiga, terbatasnya lapangan pekerjaan semakin memperburuk



kemiskinan. Dengan bekerja setidaknya membuka kesempatan untuk mengubah nasibnya. Keempat, kondisi terisolasi (terpencil) mengakibatkan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain tidak dapat menjangkaunya. Kelima, ketidak stabilan politik berdampak pada ketidak berhasilan kebijakan pro-poor. Berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan akan mengalami kesulitan dalam implementasi jika tidak didukung oleh kondisi politik yang stabil.

2.1.6 Rata-Rata Lama Sekolah

Pendidikan merupakan salah satu program yang diperlukan sebagai investasi jangka panjang dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama pertumbuhan suatu bangsa atau daerah adalah pendidikan. Jika pendidikan semakin baik, maka suatu negara atau wilayah akan semakin maju, namun jika pendidikan semakin buruk, maka suatu negara atau wilayah lambat laun akan hancur.

Tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan standar hidup, dan sekolah menyediakan metode atau media ini. Sekolah didefinisikan sebagai lembaga yang terdaftar dan secara aktif terlibat dalam pengajaran di dua tingkat: pendidikan formal (pendidikan dasar, yang mencakup pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, pendidikan menengah, pendidikan sekolah menengah atas, dan pendidikan tinggi, yang mencakup pendidikan PT) dan pendidikan non-formal (paket A, yang setara dengan sekolah dasar, paket B, yang setara dengan sekolah menengah pertama, dan paket C, yang setara dengan sekolah menengah atas). Lembaga-lembaga tersebut diawasi oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Kementerian Agama (Kemenag), organisasi publik dan swasta.



Komponen tingkat pendidikan dihitung dengan menggunakan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf (Hakim, 2002). Rata-rata lama sekolah adalah jumlah rata-rata waktu yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal. Variabel pendidikan tertinggi yang dicapai dan tingkat pendidikan yang sedang ditempuh digunakan untuk menghasilkan indikator RLS ini. UNDP (Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa) menetapkan persyaratan pendidikan minimum dan maksimum masing-masing 0 tahun dan 15 tahun.

2.1.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2020) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah bagian dari penduduk usia kerja (15 Tahun ke atas) yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen atau cuti. Disamping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan dan mereka yang sedang mempersiapkan usaha serta mereka yang tidak mencari kerja karena putus asa juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran secara luas mengenai penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kaitannya dengan kegiatan sehari-hari pada suatu saat selama periode survei. Semakin besar jumlah penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja, maka semakin kecil jumlah angkatan kerja yang

ibat pada semakin kecilnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) injuntak, 2005: 45).



Lebih lanjut, Badan Pusat Statistik (2022) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap penduduk usia kerja. Indikator ini digunakan untuk menunjukkan besaran relative dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

(Mantra, 2003) menyatakan bahwa semakin besar jumlah angkatan kerja di dalam suatu kelompok, maka semakin tinggi pula Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Sebaliknya, semakin besar jumlah individu yang mengurus rumah tangga dan bersekolah, maka semakin besar pula jumlah penduduk yang dikategorikan bukan angkatan kerja, yang pada akhirnya menghasilkan angkatan kerja yang lebih kecil dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang lebih rendah.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan persentase penduduk yang secara aktif terlibat dalam pasar tenaga kerja, yang mencakup individu yang memiliki pekerjaan dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Jumlah angkatan kerja akan bertambah dengan semakin tingginya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan jumlah angkatan kerja akan berkurang dengan semakin rendahnya TPAK.

2.1.8 Pertumbuhan Ekonomi



Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah kondisi dimana meningkatnya apatan karena terjadi peningkatan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan omi juga merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara

secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Kuznet (2012), pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jumlah dan jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologi yang diperlukan.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa maju dan berkembang suatu negara. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau rendah sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Rata-rata Lama Sekolah dengan Kemiskinan

Pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan sebuah Negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006). Mankiew (2000) menyebutkan, seseorang yang berpendidikan tinggi dapat menghasilkan gagasan baru tentang bagaimana pilihan terbaik untuk memproduksi barang dan jasa. Jika gagasan ini dapat

na oleh penduduk luas, maka semua orang dapat menggunakannya. Jika gagasan tersebut dapat dikatakan sebagai manfaat eksternal dari pendidikan. Dalam hal ini, tingkat pengembalian pendidikan yang diterima oleh



penduduk lebih besar dibandingkan dengan tingkat pengembalian yang diterima oleh individu.

Jika dikaitkan dengan teori lingkaran setan kemiskinan versi Nurse menggambarkan bahwa keterbelakangan dan ketertinggalan merupakan suatu hal yang harus diputus mata rantainya guna mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi. Keterbelakangan dan ketertinggalan dapat diatasi dengan adanya pendidikan yang diselenggarakan oleh negara untuk warga negaranya guna mendapatkan ilmu pengetahuan yang dapat mengurangi tingkat keterbelakangan dan ketertinggalan suatu daerah. Pendidikan juga merupakan *Human Capital*, semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan oleh seseorang maka akan meningkatkan produktivitas orang tersebut karena pengetahuan dan ilmu yang diperoleh lebih banyak. Peningkatan produktivitas ini akan meningkatkan pendapatan baik pendapatan individu tersebut, maupun pendapatan nasional. Peningkatan pendapatan individu akan meningkatkan kemampuan konsumsi mereka, sehingga dapat mengangkat kehidupan mereka dari kemiskinan.

2.2.2 Hubungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dengan Kemiskinan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan sebuah gambaran mengenai seberapa banyak penduduk yang terlibat dalam perekonomian suatu negara maupun wilayah tertentu. Adanya angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja maka kita bisa melihat proporsi atau perbandingan penduduk usia kerja terlibat dalam perekonomian suatu negara apakah tinggi ataupun rendah (et al., 2020). Berdasarkan hal ini maka bisa diketahui seberapa besar



keterlibatan penduduk dalam tinggi ataupun rendahnya produktivitas suatu negara.

Teori lingkaran setan kemiskinan menyebutkan bahwa kemiskinan akan terus berlanjut dan menjadi sebuah mata rantai yang tidak putus karena adanya hubungan sebab-akibat yang saling terikat (Rahman & Alamsyah, 2019). Salah satu contohnya adalah ketika Tingkat Partisipasi Angkatan Kerjanya rendah menandakan bahwa akan makin sedikit orang yang terlibat dalam perekonomian dan orang yang menganggur akan lebih banyak. Pengangguran ini bisa berdampak pada produktivitas menurun dan pada akhirnya masyarakat akan tetap berada di garis kemiskinan.

2.2.3 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan

Menurut teori trickle-down effect yang dikemukakan oleh Arthur Lewis (1954) menjelaskan bahwa kemakmuran yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang merata. Pada penelitian yang dilakukan Wahyuniarti (2008) dijelaskan didalamnya bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai indikator yang sangat penting untuk melihat keberhasilan pembangunan di suatu negara maupun daerah sebagai syarat untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Syarat keberhasilan pertumbuhan ekonomi adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut dapat menyebar disetiap golongan masyarakat, tidak hanya menyebar di golongan

penduduk kaya tetapi juga menyebar di golongan penduduk miskin.



2.3 Tinjauan Empiris

Faritz & Soejoto (2020) menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan rata-rata lama sekolah terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan dan rata-rata lama sekolah berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan.

Fitria & Novita (2024) menganalisis pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin sedangkan rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Sianturi et al. (2021) menganalisis analisis determinasi kemiskinan di Indonesia studi kasus (2016-2019). Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Hasanah et al. (2021) menganalisis pengaruh angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita terhadap tingkat kemiskinan pada Kota di Provinsi Jambi tahun 2015-2019. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa angka harapan hidup dan pengeluaran perkapita

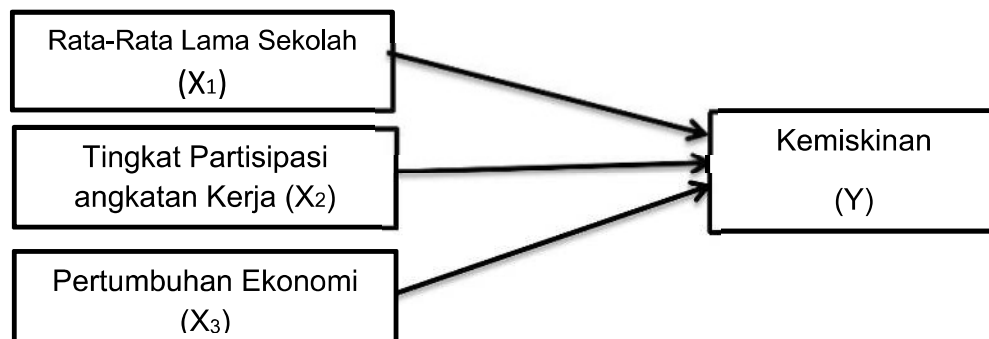


berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran adalah seluruh kegiatan penelitian untuk memudahkan dalam menjelaskan alur dari penelitian untuk memudahkan dalam menjelaskan alur dari penelitian ini yang dilakukan sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyelesaian dalam kesatuan yang utuh. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Berpikir



2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat praduga yang kebenarannya masih perlu dibuktikan. Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar dan mungkin salah. Dengan mengacu pada pemikiran yang bersifat teoritis dan studi empiris yang pernah dilakukan

itan dengan penelitian ini, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

Diduga Rata-rata Lama Sekolah memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.



2. Diduga Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Diduga Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

